

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tingkat persaingan yang semakin ketat dan kondisi ekonomi yang serba tidak menentu, mendorong setiap perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi tentang perusahaannya terutama bagi perusahaan *go public*. Setiap perusahaan yang terdaftar di pasar modal diwajibkan untuk menyampaikan laporan perusahaannya kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Laporan keuangan dan laporan tahunan wajib dipublikasikan secara formal sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik serta sebagai jendela informasi bagi pihak manajemen untuk mengetahui kondisi perusahaan (Dharma, 2010 dalam Novita, 2013).

Penyusunan laporan keuangan harus didasari oleh standar akuntansi keuangan yang berlaku. Setiap negara memiliki peraturan standar keuangan yang berbeda. Perbedaan ini mencakup perlakuan, metode, penyajian, dan pelaporan. Perbedaan yang ada disetiap negara akan mempersulit para pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan tersebut, sehingga untuk memudahkan pemahaman laporan keuangan diperlukan suatu standar yang sama antar negara yaitu *Internasional Financial Reporting Standart* (IFRS).

Dampak perekonomian dari penerapan IFRS pada akhir-akhir ini

lingkungan bisnis. Penerapan IFRS dapat memberikan manfaat

ekonomi yang sangat besar, sebagai cara untuk memudahkan pemahaman atas laporan keuangan secara internasional dimana pemanfaatannya tidak hanya untuk para pelaku usaha yang bergerak dalam perusahaan *go public* namun manfaat yang diterima juga diperoleh para pengguna jasa keuangan. Selain itu, penerapan standar ini dapat meningkatkan arus investasi global melalui transparansi (Fajriansyah, 2013). Beberapa tahun terakhir di Indonesia pengungkapan dan transparansi dalam laporan keuangan perusahaan menjadi isu penting di Indonesia (Utami, dkk., 2012).

Perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012 (Gamayuni, 2012 dalam Prawinandi dkk., 2012). Setelah melewati tahap demi tahap konvergensi di Indonesia, IFRS menimbulkan efek positif maupun efek negatif terhadap perekonomian di Indonesia. Penerapan IFRS di Indonesia ini dilatarbelakangi oleh tuntutan global dunia usaha sehingga setiap perusahaan lebih meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dan laporan tahunan yang telah disusun serta bertujuan untuk terciptanya *Good Corporate Governance* (GCG). IFRS merupakan salah satu isu yang mendapat perhatian besar oleh pemerintah, jika semua perusahaan *go public* di Indonesia menyusun laporan keuangannya berdasarkan IFRS, tentunya akan membawa manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta dapat meningkatkan investor untuk

pada suatu perusahaan di Indonesia telah di atur oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia disebabkan lemahnya pengawasan dalam transparansi dan pengungkapan perusahaan. Kasus *mark-up* laporan keuangan yang *overstated* pada PT Kimia Farma yaitu laba didalam laporan keuangan yang seharusnya Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132,000 miliar sehingga terjadi penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar (Syahrul, 2002 dalam Utami dkk., 2013).

Informasi yang tidak diungkapkan dapat merugikan *stakeholders*, selain kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma, terdapat juga kasus pada PT Petromine Energy Trading (anak perusahaan PT Bakrie & Brothers, Tbk) yang tidak mencantumkan pendapatan dari jasa penyediaan bahan bakar kepada AKR Corporindo senilai Rp 1,37 triliun dengan menggunakan bahan pokok pendapatan sebesar Rp 8,00 triliun. Akibat kasus ini, PT Bakrie & Brothers mendapatkan sanksi sebesar Rp 4,00 miliar dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Prayogi, 2011 dalam Prawinandi dkk., 2012).

Kasus yang terjadi di Indonesia ini mengindikasikan pentingnya *mandatory disclosure* dalam laporan keuangan serta lemahnya penerapan *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan tata kelola dalam perusahaan untuk mengawasi dan mencapai tujuan perusahaan serta diajukan

Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* di Indonesia, jumlah anggota dewan komisaris akan berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan perusahaan. Penelitian Kent dan Stewart (2008) serta Al-Akra *et al.* (2010) dalam Prawinandi dkk. (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian Prawinandi dkk. (2012) yang menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Kepemilikan manajerial yang besar didalam perusahaan memiliki kepercayaan untuk mengungkapkan informasi laporan keuangan kepada *stakeholders* dan manajer yang mempunyai kepemilikan saham diperusahaan akan cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena terdapat kesamaan kepentingan antara keduanya. Penelitian Nasir dan Abdullah (2004), Clemente dan Labat (2005) dalam Utami dkk. (2012) serta Utami dkk. (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan wajib IFRS. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian Fajriansyah (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Setiap perusahaan *go public* mempunyai komisaris yang berasal dari

komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007 dalam Prawinandi dkk., 2012). Penelitian Prawinandi dkk. (2012) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian Utami dkk. (2012) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib IFRS.

Komisaris utama didalam perusahaan yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis akan lebih memahami tentang pengelolaan perusahaan dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan perusahaan, serta diharapkan koordinasi dewan komisaris menjadi lebih efektif dan akan lebih baik dalam mengelola perusahaan dibandingkan dengan komisaris utama yang tidak memiliki pendidikan bisnis. Penelitian Kharis dan Suhardjanto (2012) menunjukkan bahwa latar belakang komisaris utama berpengaruh signifikan positif terhadap ketaatan pengungkapan wajib. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian Prawinandi dkk. (2012) yang menunjukkan bahwa latar belakang komisaris utama tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Perusahaan di Indonesia tentunya memiliki dewan komisaris yang bergender wanita, dimana komisaris wanita dalam meningkatkan monitoring

cenderung menghindari risiko dan lebih teliti dalam pengawasan dibandingkan pria (Kusumastuti dkk., 2007). Penelitian Feijo *et al.* (2012) dalam Prawinandi dkk. (2012) menunjukkan bahwa komisaris wanita berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian Prawinandi dkk. (2012) yang menunjukkan bahwa proporsi komisaris wanita tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Struktur *corporate governance* yang terakhir pada penelitian ini adalah jumlah anggota komite audit, dimana komite audit ditunjuk oleh perusahaan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap auditor dan kinerja manajemen sehingga pelaporan keuangan semakin berkualitas. Kent dan Stewart (2008) dalam Prawinandi dkk. (2012) serta Cety dan Suhardjanto (2010) dalam Suhardjanto dkk. (2010) mengungkapkan bahwa anggota komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian Novita (2013) yang menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penelitian yang masih jarang dilakukan di Indonesia tentang tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, padahal IFRS sudah mulai di adopsi Indonesia 2008 hingga 2010, dilanjutkan tahun 2011 masa persiapan akhir IFRS, dan implementasi

Penelitian ini merupakan replikasi dari Prawinandi dkk. (2012) yang berjudul “**Peran Struktur *Corporate Governance* dalam Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**”. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel independen kepemilikan manajerial yang berasal dari penelitian Utami dkk. (2012) dan diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan sampel perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2010, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2013.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah pada peran struktur *corporate governance* dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, latar belakang komisaris utama, proporsi komisaris wanita, dan jumlah anggota komite audit.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap

tingkat kepatuhan terhadap *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
3. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
4. Apakah latar belakang komisaris utama berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
5. Apakah proporsi komisaris wanita berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?
6. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk menguji:

1. Pengaruh positif jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
2. Pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
3. Pengaruh positif proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
4. Pengaruh positif latar belakang komisaris utama terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
5. Pengaruh positif proporsi komisaris wanita terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

6. Pengaruh positif jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dari berbagai bidang yang berkaitan. Berdasarkan dari tujuan di atas, maka dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat di Bidang Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan berupa pengembangan teori, terutama dalam bidang akuntansi keuangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai peran struktur *corporate governance* dalam tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

2. Manfaat di Bidang Praktik

- a. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini dapat menjadi masukan dan acuan untuk mencermati perilaku manajemen perusahaan dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
- b. Bagi pihak investor, penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dalam pertimbangan mengambil keputusan untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya pada perusahaan manufaktur.
- c. Bagi pihak pemerintah, penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi mengenai penerapan konvergensi IFRS di Indonesia,